

PERANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SEMARANG

Yulita Nilam Fridiyanti¹, Agus Riyanto², Suharto³, Zudi Setiawan⁴

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia^{1,2,4,3}

E-mail: yulitanilam95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Adapun target daripada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu terwujudnya pertumbuhan penduduk yang stabil dan terciptanya keluarga yang berkualitas di Kota Semarang guna menghindari kepadatan penduduk dengan keterbatasan jumlah lapangan kerja serta memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana peranan lembaga pengendalian penduduk tersebut dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pengendalian jumlah penduduk Kota Semarang Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berperan secara optimal. Namun terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti kekurangan kualitas personil, fasilitas penunjang mobilisasi layanan dan anggaran program yang terpangkas untuk program lain. Sehubungan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan meliputi penyelenggaraan pembinaan KB dengan skala prioritas, Kegiatan Refreshing Kader KB dengan pedoman protokol kesehatan dan berkoordinasi secara sinergis terkait kebutuhan sarana prasarana operasional pelayanan KB.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan.

ABSTRACT

This research was conducted at the Semarang City Population and Family Planning Office. The target of the Population Control and Family Planning Service is the realization of stable population growth and the creation of quality families in the city of Semarang in order to avoid overcrowding with limited employment and pay attention to the health of fertile couples (PUS) and the growth and development of children born. This study aims to measure the extent of the population control agency's role in controlling the rate of population growth and the obstacles encountered in controlling the population of Semarang City using a qualitative descriptive research method. The results of the research

show that the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection have played an optimal role. However, there are several obstacles that must be overcome, such as a lack of quality personnel, supporting facilities for service mobilization and program budgets that have been trimmed for other programs. In this regard, the efforts made to deal with obstacles include organizing family planning coaching with a priority scale, Refreshing Family Planning Cadres Activities with health protocol guidelines and coordinating synergistically regarding the need for operational infrastructure for family planning services.

Keywords: *Authority, Population Control, Welfare.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan menjadi isu yang sangat mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan dengan negara lain, karena pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Semuanya terkait penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan.

Jika dilihat dari segi pembangunan, maka jumlah penduduk sangat berpengaruh dengan masalah pembangunan suatu wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran yang penting. Semakin lengkap data kependudukan yang tersedia maka semakin mudah rencana pembangunan di susun. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Di samping itu disebutkan pula perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dari definisi tersebut diharapkan adanya keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk sehingga kehidupan masyarakat dapat terkendali dan seimbang.

Menurut Karmoto (2004) dalam dasardasar demografi, kebijakan kependudukan utama di Indonesia saat ini adalah kebijakan Keluarga Berencana. Kebijakan ini sudah luas diketahui oleh masyarakat, kebijakan Keluarga Berencana ini telah berhasil mengubah pandangan masyarakat yang

pro natalis menjadi anti natalis (Chair & Kariono, 2011),

Sebagai salah satu kota metropolitan, Semarang boleh dikatakan belum terlalu padat. Bila dilihat menurut Kecamatan terdapat 3 kecamatan yang mempunyai kepadatan di bawah angka rata-rata Semarang, sebagai berikut: Kecamatan Tugu, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Gunungpati, Dari ketiga Kecamatan tersebut, dua diantaranya merupakan daerah pertanian dan perkebunan, sedangkan satu kecamatan lainnya merupakan daerah pengembangan industri. Namun sebaliknya untuk Kecamatan-kecamatan yang terletak di pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar tetapi jumlah penduduknya sangat banyak, kepadatan penduduknya sangat tinggi. Besarnya jumlah penduduk di pusat kota ini mengakibatkan terdapat lingkungan kumuh yang dari segi ekonomi masyarakatnya masih berada pada garis kemiskinan. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka dibentuklah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP2KB). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang menerapkan kesetaraan gender dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota Semarang demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah kebijakan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana teknis di bidang Keluarga Berencana di kota Semarang, membuat penulis tertarik untuk mengetahui sejauhmana peranan lembaga pengendalian penduduk tersebut dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

KAJIAN PUSTAKA

Peran

Dimensi peran dalam konteks sosial dan organisasi dapat dipahami melalui berbagai pendekatan konseptual dan teoritis yang diajukan oleh berbagai ahli. Berikut adalah beberapa dimensi peran yang umumnya dikenali berdasarkan pandangan para ahli:

1. Dimensi Peran Sosial

Role Expectations (Harapan Peran): Ini mengacu pada harapan sosial terhadap individu dalam peran tertentu. Para ahli sosial seperti Erving Goffman menekankan pentingnya memahami bagaimana masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu terkait dengan peran-peran yang dimainkan dalam kehidupan sehari-hari.

Role Conflict (Konflik Peran): Robert K. Merton mengemukakan konsep konflik peran, yang terjadi ketika individu dihadapkan pada harapan yang saling bertentangan dalam perannya. Misalnya, seorang karyawan yang harus bekerja lembur untuk mengejar karirnya, tetapi juga memiliki kewajiban keluarga yang harus diemban di rumah.

Role Strain (Tekanan Peran): Konsep ini menunjukkan ketegangan yang muncul saat individu merasa sulit memenuhi semua harapan yang ada pada perannya. Hal ini bisa terjadi dalam peran ganda atau kompleks.

2. Dimensi Peran dalam Organisasi

Role Clarity (Keterangan Peran): Ahli manajemen seperti Henry Mintzberg menekankan pentingnya pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari suatu peran dalam konteks organisasi. Jika individu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peran mereka, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian.

Role Ambiguity (Ketidakjelasan Peran): Ini adalah situasi di mana individu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari peran mereka dalam organisasi. Hal ini dapat mengarah pada kebingungan dan penurunan kinerja.

Role Performance (Penampilan Peran): Ini mengacu pada sejauh mana individu dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan peran mereka dalam organisasi.

Penilaian penampilan peran dapat memengaruhi evaluasi kinerja individu.

3. Dimensi Peran dalam Kelompok

Role Differentiation (Diferensiasi Peran): Ini adalah proses di mana peran-peran dalam kelompok dibedakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dalam kelompok yang baik, masing-masing anggota memiliki peran yang berbeda yang saling melengkapi.

Role Integration (Integrasi Peran): Ini adalah kemampuan anggota kelompok untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Integrasi peran yang baik dapat meningkatkan kinerja kelompok.

Role Identity (Identitas Peran): Ini mengacu pada sejauh mana individu mengidentifikasi diri mereka dengan peran mereka dalam kelompok. Identitas peran yang kuat dapat memotivasi individu untuk berkontribusi lebih aktif dalam kelompok.

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Peran ialah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan (Wolfman, 1992:10).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Katz dan Khan (Mifta Thoha, 2002:80), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen

peran, norma dan nilai. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi yang ditentukan oleh karakteristik pribadi.

Sedangkan menurut (Liang Gie, 2004:44) peran adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun secara praktis suatu aturan saling bergantung satu sama lain.

Pengendalian

Menurut Mulyadi (2007:89) Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut (Indra Bastian, 2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Menurut Harahap (2011:89) Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif).

Berdasarkan uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua bisa berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Penduduk

Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 Penduduk adalah warga negara

Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Jadi dari uraian di atas bisa diambil penjelasan bahwa penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling

berintraksi satu sama lain secara terus menerus.

Pertumbuhan Penduduk

Menurut Mulyadi Subri (2003:16), pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Sedangkan menurut Noveria Mita (2011: 5) Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah/ukuran (*size*) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk tingkat global (dunia), pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua peristiwa kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami. Pada lingkup yang lebih kecil, misalnya ditingkat negara, pertumbuhan penduduk dipengaruhi pula oleh imigrasi penduduk ke dan keluar dari suatu Negara.

Disebutkan pula pada Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada

seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Perubahan jumlah/ukuran (*size*) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sehingga, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang Tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2) bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah bukan urusan yang bersifat

fungsi penunjang akan tetapi bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan demikian tidak memungkinkan menggunakan Nomenklatur (Badan). Jika tidak menggunakan nomenklatur badan maka untuk penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana jelas berbentuk Dinas, lebih tepat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang. Banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang mana rasio laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang terbesar diantara Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu upayanya adalah turun langsung ke masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran tentang pengendalian penduduk Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) sebagai subjek penelitian. Penelitian diskriptif

kualitatif ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DP2KB dalam Pengendalian Penduduk Kota Semarang

Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil studi pustaka yang dilaksanakan penulis melalui web resmi, renstra, berita, maupun jurnal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Semarang. Maka penulis mendapat hasil dari jumlah pegawai yang terdapat di DP2KB Kota Semarang Pada Tahun 2017 sebanyak 95 orang, terdiri dari 35 orang struktural dan 57 orang Fungsional serta 3 orang non ASN. Menurut tingkat pendidikan yang dimiliki, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang terdiri sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikannya

NO	KATEGORI	JUMLAH PEGAWAI	PROSENTASE (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	22	23,2
4	Diploma III (D-3)	4	4,2
5	Strata 1 (S-1)	62	65,2
6	Strata 2 (S-2)	7	7,4
JUMLAH		95	100

Sumber: Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Tahun 2015-2019

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai DP2KB Kota Semarang sudah banyak yang berpendidikan, dan sesuai golongan yang dimiliki maka dapat terlihat bahwa sebagian besar pegawai DP2KB Kota Semarang sudah sarjana. Artinya sebagian besar pegawai DP2KB Kota Semarang sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang berpendidikan.

Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang sejalan dengan kebijakan Nasional, maka tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri dimana kebijakan tersebut mengacu kepada kebijakan pusat. Untuk Kota Semarang sendiri kita mempunyai DP2KB. Dimana organisasi pemerintah ini merupakan mitra BKKBN Provinsi dalam hal mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Semarang. Kebijakan kependudukan yang utama saat ini adalah kebijakan keluarga berencana,

maka DP2KB sebagai lembaga pemerintah yang menangani masalah keluarga berencana di daerah dalam menyusun program kerja di daerah, dalam hal ini Kota Semarang harus berdasarkan perpaduan antara kebijakan Nasional dan kebijakan yang ada di daerah.

Dalam suatu instansi tidak terkecuali DP2KB untuk menjalankan tugas yang telah ditentukan, mereka membentuk berbagai bidang yang akan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dari pusat, dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menentukan bidang-bidang yakni: sekretariat, bidang keluarga berencana, bidang penyuluhan dan penggerakan, bidang pengendalian penduduk, serta bidang ketahanan dan kesejahteraan. Setiap bidang yang ada di DP2KB Kota Semarang diharapkan dapat mengatasi masalah pertumbuhan penduduk

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang merupakan salah satu organisasi pemerintah yang tujuan dari tupoksinya adalah menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang. Jika dilihat dari rincian tugas pokok dan fungsi yang di miliki bidang keluarga berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk langsung terlibat aktif kepada masyarakat, dimana bidang KB tersebut menyusun program-program keluarga berencana guna mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Semarang.

Fokus kinerja dari DP2KB Kota Semarang sendiri adalah kepada perempuan dan anak dengan tujuan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat, dimana kesejahteraan itu akan tercapai apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan. Jika dilihat dari program kerja, bidang pengendalian penduduk dan KB bekerja sendiri-sendiri, dimana bidang KB lebih menekankan kepada pemasangan alat KB serta mempromosikan program KB, sedangkan bidang pengendalian penduduk lebih kepada menekan angka pertumbuhan penduduk.

DP2KB merupakan stakeholder dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Semarang. Peranan DP2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sangat diharapkan pemerintah.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)
2016	1.559.198	0,96
2017	1.575.105	0,83
2018	1.584.906	0,97
2019	1.776.618 *	

Sumber: Kantor BPS Kota Semarang – Semarang Dalam Angka Tahun 2016-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya, peningkatan jumlah penduduk tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah keluarga dari tahun ke tahun tetap. Rata-rata jiwa dalam keluarga lebih cenderung menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh keluarga dari pada menggambarkan kondisi tingkat fertilitas. Rata-tara jiwa perkeluarga dari tabel tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan program yang diharapkan pemerintah yakni setiap keluarga terdiri dari 4 orang.

Dalam pengendalian jumlah penduduk, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang meliputi peningkatan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan alat kontrasepsi, kerjasama baik dengan pihak pemerintah atau lembaga lain dan dengan pihak swasta.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan

terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan kerjasama yang baik, baik itu dengan masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan yang lainnya, demikian juga dengan DP2KB Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, maka DP2KB Kota Semarang menetapkan kebijakan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah dan masyarakat. kerjasama yang di jalani DP2KB dengan lembaga lain adalah dalam hal koordinasi, keterpaduan dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan KB. Koordinasi dan keterpaduan ini dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan dan keselarasan bersama agar mempunyai daya ungkit yang luas kepada pelaksanaan gerakan keluarga berencana nasional dalam rangka responding program, maka fungsi koordinasi dan keterpaduan akan semakin penting. Koordinasi dan keterpaduan bersama dilakukan antara lain melalui forum rapat koordinasi pada setiap wilayah secara teratur, sehingga dapat saling tukar informasi bagi keterpaduan program yang dilakukan bersama. Terselenggaranya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan jumlah aseptor 44,93% dari target, serta terlaksananya kegiatan PKK KB kesehatan dengan pencapaian 15,489 aseptor atau 66,97% dari target. Jika dilihat dari target yang dicapai DP2KB dalam upaya

Koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, hasil yang di dapatkan jauh dari apa yang di harapkan jika dilihat dari segi kelembagaan.

Hambatan-hambatan dalam Pengendalian Jumlah Penduduk Kota Semarang

Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah atau pun organisasi lain selalu mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut sering menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan dalam pengendalian jumlah penduduk untuk kota Semarang sendiri mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh DP2KB Kota Semarang dalam menekan pertumbuhan penduduk di Kota Semarang berasal dari faktor internal dari dalam diri DP2KB itu sendiri dan faktor eksternal dari luar DP2KB itu sendiri dalam hal dari masyarakat. Adapun hambatan-hambatan yang dialami BPPKB adalah dari Faktor Internal, pertama Faktor Penghambat dari BPPKB Kota Semarang, yaitu Kurangnya Tenaga Teknis, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki Kader di setiap kecamatan maupun kelurahan dimana setiap kader tersebut diwajibkan melakukan koordinasi dengan DP2KB Kota Semarang. Namun, luasnya ruang lingkup yang ada dimana kota Semarang terdiri atas

16 Kecamatan menjadikan pemerintah mengalami kesulitan mengingat tenaga teknis yang ada sangat terbatas. Jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana saat ini adalah sekitar 123 orang untuk 21 kecamatan. Faktor internal kedua, yaitu Infrastruktur yang Belum Memadai, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka DP2KB Kota Semarang memerlukan infrastruktur guna membantu DP2KB Kota Semarang dalam bekerja, baik yang digunakan kepada masyarakat maupun yang digunakan oleh DP2KB itu sendiri untuk keperluan kedinasan. Pada saat ini DP2KB Kota Semarang telah memiliki 2 mobil penyuluhan serta 5 motor untuk bekerja, di samping itu DP2KB Kota Semarang juga memiliki beberapa peralatan kesehatan, namun belum memadai. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada DP2KB membutuhkan sarana maupun prasarana yang memadai sehingga program kerja dapat dilakukan secara maksimal. Faktor external, yakni Hambatan-hambatan yang datang dari Masyarakat, yaitu Pernikahan yang Dilakukan Pada Usia yang Masih Muda (Pernikahan Usia Dini), menurut pandangan beberapa kalangan, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan kita harus memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Dalam mengatur pernikahan itu sendiri pemerintah pusat juga menetapkan peraturan mengenai

masalah pernikahan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*” Undang-undang pernikahan tersebut diatas dapat memicu terjadinya pernikahan diusia yang boleh dikatakan remaja. Usia 16 tahun itu masih termasuk usia yang remaja, sehingga usia pernikahan yang disebutkan oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencan. Pada umur yang masih 16 tahun secara psikologi seseorang itu belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, BKB mengharapkan usia perkawinan yang ideal adalah umur 25 tahun bagi pria dan umur 21 tahun. Peraturan pemerintah mengenai usia pernikahan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) sangat beresiko tinggi untuk menambah jumlah pertumbuhan penduduk. Dalam lingkungan keluarga prasejahtera, kelompok umur ini dinilai sangat rentan melakukan pernikahan usia dini. Kerentanan dalam melakukan pernikahan dini tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dalam hal ini diharapkan juga peran aktif dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat. Selain itu yang memicu pernikahan di usia muda adalah karena remaja berfikir secara emosional untuk

melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Mereka masih belum menyadari peran dan tanggung jawab yang akan mereka pikul saat berumah tangga nanti. Campur tangan orang tua dalam urusan pernikahan anak juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan yang sangat cepat. Orang tua terkadang ingin cepat menikahkan anaknya karena ingin cepat-cepat mendapatkan keturunan. Untuk kawasan pemukiman kumuh seperti daerah pinggiran rel kereta api permasalahan pernikahan usia dini juga mengalami masalah yang sama yakni masih rendahnya kualitas ekonomi dan kesenjangan pendidikan merupakan hal memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung cepat menikah.

KESIMPULAN

Kewenangan dan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. DP2KB Kota Semarang dalam pengendalian jumlah penduduk kota Semarang melibatkan peran aktif masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik, baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Setiap kebijakan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disampaikan langsung kepada masyarakat dan lembaga pemerintah

maupun swasta baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Semarang terdiri atas hambatan Intern yakni hambatan yang berasal dari dalam DP2KB Kota Semarang dan hambatan ekstern yakni hambatan yang berasal dari luar DP2KB Kota Semarang yakni masyarakat.

Hambatan yang berasal dari DP2KB itu sendiri yakni kurangnya tenaga teknis dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan hambatan yang berasal dari masyarakat meliputi pernikahan usia dini di masyarakat, kurangnya pemanfaatan program pemerintah oleh masyarakat dan tingginya angka kelahiran. Semua masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana. Namun pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mau berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana walaupun masyarakat sudah mengetahui adanya kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). *Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*.
<https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212>

- Ahmad, R. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah>
- Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2(2), 165–181. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814>
- Azwar, M., & Amaliah, R. (2017). *Pemanfaatan Jurnal Elektronik Sebagai Sumber Referensi Dalam Penulisan Skripsi Di Institut Pertanian Bogor* (Vol. 5, Issue 1).
- Fitri, P. O., & Fernandes, R. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penyalahgunaan Gadgetoleh Anak diMasa Pandemi Covid-19(Studi: Nagari Durian GadangKabupatenLimapuluh Kota). *Jurnal Perspektif*, 4(3), 266. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.445>
- Irhandayaningsih, A. (2020). Pengukuran Literasi Digital Pada Peserta Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. *ANUVA*, 4(2), 231–240.
- Kalsum, U. (2016). Referensi sebagai layanan, Referensi sebagai tempat: sebuah tinjauan terhadap layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi. *Jurnal Iqra'*, 10(1), 132–136.
- Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). *Cosmogov*, 1(2).
- Maulana, S. (2016). Pemanfaatan Computational Fluid Dynamics (Cfd) Dalam Strategi Penelitian Simulasi Model Pada Teknologi Penghawaan Ruang. In *Jurnal Education Building* (Vol. 2, Issue 2).
- Mulyadi, M. (2011). *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya* (Vol. 15, Issue 1).
- Nashihuddin, W., Dwi, D., & Aulianto, R. (2016). Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah Sesuai Ketentuan Akreditasi: Upaya Menuju Jurnal Trakreditasi Dan Bereputasi Internasional. In *Jurnal Pustakawan Indonesia* (Vol. 15, Issue 1).
- Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. *Ulummudin*, 9(21), 48–60. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/index
- Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. *E-Journal BKN*, 2(2), 1–8. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/149>
- Wahyudiati, D. (2018). *Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Desa Kasongan The Effect Of Financial Aspect And Human*

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 7 Juli 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(489-502)

Resource Competence On Umkm

Performance In Kasongan

VILLAGE.

<https://journal.student.uny.ac.id/i>

[index.php/profita/article/view/137](https://ojs.unigal.ac.id/index.php/profita/article/view/137)

61/13264